

**PERTUMBUHAN DAN MODEL KONSTITUSI
SERTA PERUBAHAN UUD 1945
OLEH PRESIDEN, DPR,
DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

*(The Growth, Model, and Informal
Changes of An Indonesian Constitution)*

MOHAMMAD FAJRUL FALAAKH

GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
RANGKUMAN	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR DIAGRAM	xviii
BAB I PENGANTAR	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	3
C. Penelitian dan Karya Ilmiah Terkait.....	8
D. Manfaat (Sumbangan) Hasil Penelitian	13
E. Tujuan Penelitian.....	14
BAB II TEORISASI HUKUM DAN KONSTITUSI	17
A. Istilah dan Definisi	18
B. Pijakan dalam Divergensi Teori Hukum dan Konstitusi ..	21
C. Fungsi-Fungsi Konstitusi	30
D. Masyarakat, Konstitusi, dan Negara	36
E. Model dan Materi Muatan Konstitusi	43
BAB III PERUBAHAN NONFORMAL DAN POLITIK IMPLE- MENTASI KONSTITUSI	47
A. Teori-Teori Pertumbuhan Konstitusi	47
B. Teori-Teori Perubahan Konstitusi	48
1. Istilah “Perubahan Nonformal Konstitusi” dan Model Prosedural Perubahan Konstitusi.....	48
2. Beberapa Model Prosedural Perubahan Konstitusi....	49

3.	<i>Institutional Interplay</i> (Legislasi-Ajudikasi) dan <i>Institutional Development</i> sebagai Faktor dalam Prosedur Nonformal.....	53
C.	Politik Konstitusi: Implementasi Konstitusi oleh Lembaga Negara	63
1.	Politik Legislasi: <i>Legisprudence?</i>	65
2.	Ajudikasi Konstitusional.....	72
3.	Teorisasi/Hipotesis Penelitian.....	75
BAB IV	SKETSA/<i>COUNTOUR</i> REZIM KONSTITUSI INDONESIA (<i>CONSTITUTIONAL CONTOUR</i>)	79
A.	Sistem Pemerintahan: Semipresidensial, <i>Parliamentary- Cabinet, Mixture, Partidocracia?</i>	86
B.	Sistem Parlemen: Trikameral, Ganda (Bifurkasi), Legislasi Nonpresidensial.....	89
C.	Model Ajudikasi Konstitusional.....	92
1.	Beberapa Permasalahan dalam Pengaturan Wewenang MK	101
2.	Menguji Undang-Undang	103
3.	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).....	104
4.	MK dan Pemilu	105
5.	Efektivitas Putusan MK	106
6.	Perekrutan Hakim Konstitusi	108
D.	Faktor Hierarki Hukum pada Bifurkasi Ajudikasi Konstitusional	110
E.	Hubungan Desentralistik Pusat-Daerah di Negara Kesatuan.....	116
F.	Hak-Hak Positif dalam UUD 1945	121
1.	Isu Teoretis.....	122
2.	HAM dan Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>)	124
3.	Hak dan Kewajiban.....	125
4.	Beberapa Prinsip Penerapan HAM	125
G.	Watak <i>Rigid-Flexible</i>	126
H.	Asas-Asas HTN dalam UUD 1945 (<i>Constitutional Values</i>).....	127
BAB V	PERUBAHAN NONFORMAL TERHADAP KONTUR REZIM KONSTITUSI	128
A.	Makna Perubahan Nonformal (terhadap Kontur Rezim Konstitusi).....	128

1.	Terganggunya Redistribusi Kekuasaan (Horizontal, Vertikal): <i>New Separation of Powers</i> sebagai Keniscayaan Reformasi (Demokratisasi), dan <i>Model Checks and Balances</i> di Indonesia (Proliferasi Lembaga Negara; <i>Independent Auxiliary Agencies</i>) – Skema WCRU	128
2.	Formal-Material	137
BAB VI DISTRIBUSI KEKUASAAN NEGARA PASCA-AMANDEMEN (KE ARAH <i>LEGISLATIVE HEAVY</i>)....		
A.	<i>Legislative Heavy</i>	144
1.	Struktur Lembaga Legislatif dalam Sistem Perwakilan Baru	149
2.	Tata Hubungan Baru Lembaga Legislatif – Eksekutif	159
B.	Indikasi ke Arah <i>Legislative Heavy</i>	178
1.	<i>Legislative Heavy</i> dari Sisi Atribusi Kekuasaan Negara yang Diterima DPR	179
2.	<i>Legislative Heavy</i> dari Sisi Perimbangan Kekuasaan Antarlembaga Negara	180
3.	<i>Legislative Heavy</i> dari Sisi Perumusan Lembaga DPR	181
4.	<i>Legislative Heavy</i> dari Sisi Praktik Ketatanegaraan ..	182
C.	Kritik terhadap UUD Amandemen	183
BAB VII <i>POST SCRIPTUM</i> (KESIMPULAN DAN SARAN).....		
184		
DAFTAR PUSTAKA		
186		
BIOGRAFI PENULIS		
202		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anatomi UUD 1945 Pra-amandemen dan Pasca-amandemen ..	2
Tabel 2.	Fungsi Konstitusi (<i>Regulatory</i> , Kanalisasi, Proteksi).....	32
Tabel 3.	Model Prosedural (Metode) Perubahan Konstitusi	55
Tabel 4.	Model Prosedural (Metode) Perubahan Nonformal Konstitusi..	58
Tabel 5.	Skema Perbandingan: Presidensialisme dan Parlementarianisme	87
Tabel 6.	Teorisasi Hubungan Pusat-Daerah	116
Tabel 7.	Pengaturan Kelembagaan DPD dalam UUD Amandemen	151
Tabel 8.	Pengaturan Kelembagaan DPD dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003	153
Tabel 9.	Pengaturan Bidang Kekuasaan Legislatif.....	160
Tabel 10.	Hubungan Bidang Eksekutif DPR-Presiden.....	167
Tabel 11.	Hubungan Bidang Yustisial DPR-Presiden	175

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.	Hubungan Bidang Legislatif	161
Diagram 2.	Hubungan Bidang Eksekutif	166
Diagram 3.	Hubungan Bidang Yustisial	174
Diagram 4.	Hubungan dalam Sistem Pengawasan.....	176